**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS**

**(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH)**



**OLEH:**

**STEFANIA PENI KABELEN**

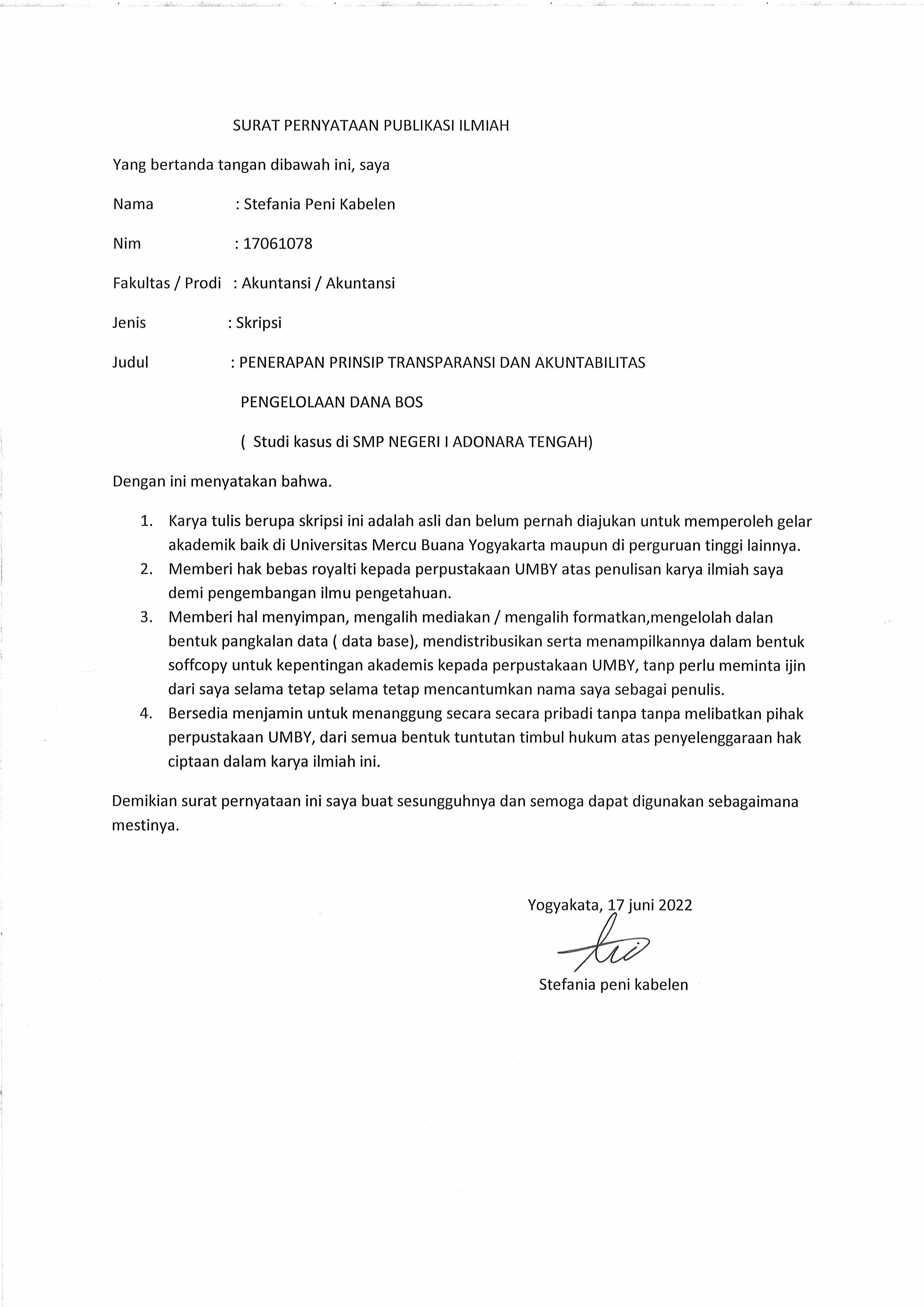
**17061078**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**YOGYAKARTA**



**ABTRAK**

Penelitian ini mengangkat judul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Adonara Tengah tahun 2018. Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya tulisan SMP Negeri 1 Adonara Tengah mengadakan pendidikan bebas pungutan sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran akaan tulisan tersebut.Penelitian ini memiliki 3 fokus penelitian, yaitu pengelolaan dana BOS, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, faktor pendorong dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Loksi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Adonara Tengah. Dengan subjek penelitian yaitu : Kepala sekolah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite sekolah. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan interview (wawancara). Teknik analisa data yang di gunakan oleh peneliti ialah reduksi data, display, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah tahun 2018 yaitu :1. Perencanaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara menyusun RKAS yang melibatkan Tim Manajemen BOS2. Pelaksanaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah 3. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.4. Faktor pendukung dan penghambat penerpan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah tahun 2018 menunjukan bahwa masih banyak faktor penghambat yang harus di perbaiki lagi.

Kata kunci : Pengelolaan Dana BOS, Transparansi dan Akuntabilitas, Faktor pendukung dan penghambat.

**ABSTRACK**

Stefania peni kabelen (17061078), 2021: Application of the principles of Transparency and Accontability in the Management of school Operation Assistance Funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah in 2018. Advisory Lectuer Nugraeni, SE.M.Sc.This study raises the title Application of the Principles of Transparency and Accountability in the management of school Operational Assistance Funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah 2018. This research was motivated by an article that SMP Negeri 1 Adonara Tengah held aducation free of school fees. This research was conducted to find out the truth of the writing.This research has 3 research focuses, namely the management of BOS funds, the application of the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds, the driving and inhibiting factors of the application of the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds.This research is a qualitative descriptive study. The location of this research was canducted at SMP Negeri 1 Adonara Tengah. The research subjects are: the principal, the BOS treasurer, the teacher, and the school committee.The data collecation technique used by the researcher was observation, dacumenttation an interview (interview). Data analysis techniques used by researchers the data reducation, display, data reducation, display, data presentation and conclusions.

The results of this study indicate that the management of BOS funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah in 2018 is: 1. Planning for BOS funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah in 2018 was carried out by campilig RKAS involving the BOS Management Team Implementation of the BOS fund at SMP Negeri 1 Adonara Tengah. 2. The application of the principle of transparency and accountability in the management of BOS funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah is in accordance of transparency and accountability. 3. The supporting and inhibiling factors for the transparency and accountability principle in the management of BOS funds at SMP Negeri 1 Adonara Tengah 2018 show that there are still many inhibility factors that must be improved again.Keywords: BOS Fund Management, Transparency and Accountability, Supporting and Inhibiting Foctor

**A. PENDAHULUAN**

Kesadaran terhadap pentingnya suatu pendidikan memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa depan, telah mendorong berbagai cara dan perhatian di seluruh lapisan masyarakat dalam setiap gerak langkah dan perkembangan di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang pada intinya untuk memanusiakan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas yang lebih baik. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang (educative for all). Oleh sebab itu problem pendidikan sepanjang hayat akan selalu menjadi dinamika kehidupan manusia. Pendidikan sebagai kebutuhan manusia telah diatur dalam undang-undang sehingga Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar untuk mampu memberikan pendidikan yang baik, benar dan berkualitas bagi warga negaranya. Hal ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan sangat sehingga tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Tujuan Negara yang termaktub pada pembukuan Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejaheraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 menyatakan tentang hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan yang baik bermutu dan berkualitas. Mengacu pada pembukuan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1954, maka pemerintahan mengatur Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib megikuti pendidikan dasar (DIKDAS) 9 tahun. Konsekuensi dari amanat undang-undang, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memilki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan (SD) serta pendidkan lain yang terutang dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang sisdiknas dan pasal 34 ayat (2), sehingga masyarkat tidak merasa terbebani oleh biaya pendidikan. Adanya tulisan “menyelenggarakan pendidikan bebas pungut biaya bagi seluruh siswa” pada sekolah menengah tingkat pertama (SMP) atau pendidkan lain yang sederajat maka pemerintah berharap tidak ada lagi warga Negara Indonesia yang tidak bersekolah / putus sekolah alasan tidak mampu / tidak punya biaya.

Pada dasarnya sumber-sumber keuangan dan pembiayaan yang diperoleh sekolah dikelompokan menjadi 3 yaitu :

1. Pemerintahan, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Orang tua atau peserta didik

3. Masyarakat

Dalam mendukung konteks sekolah bebas pungutan, pemerintah di Indonesia telah meluncurkan suatu program di dunia pendidikan adalah dengan memberikan Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) kepada peserta didik yang orang tuanya / wilayah tidak mampu program BOS muncul sejak bulan juli 2005, setelah adanya program kompensasi BBM program BOS di berikan demi tercapainya program Wajib Belajar.

Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS diantaranya.

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS meliputi semua peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional pendidkan.4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perdanaan Pendidkan.5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan

Pendidikan.6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.8. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.07/2016 tentang pengelolaan Tranfer

Kedaerah dana desa.

Dana Bos yang diberikan oleh pemerintah dikelolah secara mandiri oleh lembaga pendidikan masing-masing. Dana Bos dikelola secara MBS ( manajemen berbasis sekolah), mulai dari perencanaan, perealisasian penggunaan dana Bos, pencatatan atau pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengevalusian pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yaitu ekonomi, efesiensi, efektifitas, tranparan, akuntabilitas, keadilan serta kejujuran. Karena hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Dalam manajemen pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah perancanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan akuntansi dan evaluasi (auditing) secara transparan akuntabel, dan demokrtis. Pengembangan penyusunan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:1. Laju pertumbuhan peserta didik,

2. Inflasi,3. Pengembangan program dan perbaikan4. Proses pengajaran dan pembelajaran Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di sekolah maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan program dana BOS tersebut.

Sehubungan dengan hal itu agar pengelolaan dan BOS berjalan dengan baik dan lancar maka pemerintah meluncurkan buku petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yang berisi tentang landasan hukum dana BOS, pengertian dana BOS, tujuan dana BOS, sasaran dana BOS, biaya satuan dana BOS, mekanisme pencarian dana BOS dan lain-lainnya. Pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan sesuai aturan, tertib administrasi, tranparan, akuntabel, efesiensi, tepat waktu, sehingga terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis BOS setiap tahunnya, adalah agar setiap lembaga pendidikan dapat mengerti cara mengelolah , menggunakan, melaporkan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Pusat / provinsi / kab / kota.SMP Negeri 1 Adonara Tengah merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang menerima dana BOS yang dikelola secara manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pengamatan / observasi peneliti awal di SMP Negeri 1 Adonara Tengah yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan program dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah sudah berlangsung dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya.

Permasalahan yang masih di alami oleh Tim Manajemen BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah adalah kurangnya partisipasi, perhatian, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Partisipasi masyarakat yang kurang karna tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana BOS sehingga mereka kurang melakukan pengawasan. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terkait dengan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan mempelajari dokumen pencatatan dan pembukuan dana BOS, pencarian dana BOS dari pemerintah sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu bulan pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi tersebut pencarian dana BOS tidak setiap bulan sehingga sekolah mengalami kebingungan dalam mengelola biaya operasional sekolah. Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas atau memakai dana pribadi kepala sekolah dan bendhara yang digunakan seperti untuk membayar guru honor, Pembina ekstakurikuler dan membayar langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan biaya operasional sekolah lainnya).

Permasalhan lain yang terjadi di SMP Negeri 1 Adonara Tengah yaitu dalam proses pembatasan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Bendahara BOS mengalami kesulitan karena sehingga ada perubahan aplikasi program dana BOS dari TIM BOS pusat. Program dana BOS, berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) perbedaannya adalah dana BKM diberikan secara langsung dan tunai melalui Bank kepada siswa dan wali murid, sedangkan BOS tidak diberikan langsung kepada siswa tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh lembaga sekolah. Dana BOS yang diberikan ke setiap lembaga berbeda tergantung pada jumlah siswanya, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tergantung pada jumlah siswanya, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tidak sama atau bervasiasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SMP sebesar Rp. 800.000,00 / siswa/ tahun atau rata-rata tiap bulan Rp. 66.000,00.

Sedangkan dana BOS yang diperoleh SMP Negeri 1 Adonara Tengah pada anggaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Siswa Dana BOS perbukan Dana pertahun Jumlah keseluruhan

1. 132 Rp. 66.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 105.600,000

Tujuan program dana BOS yang diluncurkan oleh pemerintah di SMP Negeri 1 Adonara Tengah adalah memberikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih layak dan bermutu dalam rangka program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Pertama 3 tahun.

Berkenaan dengan hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa SMP Negeri 1 Adonara Tengah sudah dapat terdanai dengan adanya dana BOS meskipun tidak semua kegiatan sekolah tercover dengan dana BOS.

Partisipasi warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan walimurid merupakan parameter yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “ Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntanbilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH.”

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan data bantuan operasional (BOS) di Smp Negeri 1 Adonara Tengah. Penelitian kualitatif di tujukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut prspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang di ajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, dan perpektifnya.

Dilihat dari tujian penelitian ini, fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerpan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan data BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan dana bantuan operasional (BOS) di Smp Negeri 1 Adonara Tengah.

**C. LANDASAN TEORI**

Menurut pendapat H. Malayu S.P pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administasi. Pengelolaan atau manajemen adalah kecakupan mengolah tentang proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efektif untuk mencapai target tertentu.

Mengacu pada pendapat E. Mulyasa, manajemen merupakan metode popular yang mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan sumber metode kegitan yang dilakukan dengan kerja sama untuk menentukan, meninterprestasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan mengakutualisasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuanting*), dan pengawasan (*controlling*) atau POAC.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan, pengelolaan adalah kumpulan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan suatu oranisasi.

Analisis hasil tentang mekanisme pengambilan / pencairan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah telah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS dengan menunjukan buku rekening BOS, identitas diri berupa KTP asli dan fotocopy, kitir atau voucher dari petugas BOS UPTD kecamatan Adonara Tengah.

Dari hasil pemaparan peneliti diatas sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 1 tahun 2018, penyaluran dana BOS dilakukan setiap triwulan yaitu Januari- Maret, April- juni, Juli- September, Oktober-Desember.

Proses Penggunaan, Pembelanjaan, dan pembukuan terkait dengan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah

Penggunaan dan larangan dana BOS telah dijelaskan secara rinci pada petunjuk pedoman dana BOS dengan tujuan agar penggunaan dana BOS semakin minim kesalahannya.

Analisis hasil komponen penelitian pada aspek penggunanya sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS.

Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah meliputi :

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang

3. Belanja modal

Dari hasil pemaparan penelitian d iatas sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 1 tahun 2018, dana BOS digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan pengembangan perpustakaan, PPBD, ekstrakurikuler dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiata pembelian atau pemelanjaan barang dan jasa yang didanai oleh dana BOS tidak diatur pada pedoman petunjuk teknis dana BOS namun ada prosedur tersendiri. SMP Negeri 1 Adonara Tengah membentuk tim belanja untuk menangani pembelanjaan barang dan jasa yang di butuhkan oleh sekolah. Tim belanja akan menyesuaikan dengan RKAS yang telah disahkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Analisis hasil pembelian / pembelanjaan barang dan jasa di SMP Negeri 1 Adonara Tengah, memilki mekanisme tersediri yaitu membeli barang yang paling dibutuhkan segera oleh sekolah. Selain itu juga menerapkan prinsip efektif dan efesien. Efektif adalah barang yang dibeli memilki manfaat yang besar untuk kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Efesien artinya pembelian barang harus dengan harga yang muruh / minimal tapi mendapatkan barang yang berkualitas.

Dari hasil pemaparan penelitian diatas sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2018, pembelian dana BOS adalah seluruh aktivitas membeli barang dan jasa yang pemanfaatannay berasal dari dana BOS.

Pembukuan yang dibuat oleh bendahara BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah meliputi RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu rekening bank, buku pembantu pajak.

**E. KESIMPULAN DAN SARAN**

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Bagaimana Pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) di SMP Negeri 1 Adonara Tengah

Perencanaan penyususnan RKAS yang disusun ole Tim Manajemen BOS, yang disosialisasikan kepala sekolah dan komite sekolah serta disosialosasikan kepada wali murid.

Pelaksanaan dana BOS meliputi : penyaluran dana BOS, pengambilan / pencairan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa, pembukuan dana BOS.

Pengawasan dan evaluasi dana BOS.

Pelaporan dana BOS.

2.Bagaimana penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah :

a. Adanya keterbukaan perencanaan dan penyususnan RKAS yang diawali dengan rapat bersama Tim Manajemen BOS sekolah.

b. Kepala sekolah mensosialisasikan draft RKAS kepada wali murid setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah.

c. Adanya pemaparan penggunaan dana BOS dan realisaainya yang sudah sesuai dengan RKAS / BOS K1 yang telah ditempel dipapan penggunaan sekolah.

d. Partisipasi antar pihak sekolah, komite dan wali murid.

Akuntabilitas :

a. Adanya pertanggung jawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait baik

internal maupun eksternal.

b. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara

Tengah baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan provinsi.

Dinas Pendidikan pusat berupa pelaporan rekap anggaran belanja perbulan,

laporan bulanan, laporan triwulan.

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara

Tengah adalah :

Faktor Pendukung :

a. Kerja sama yang baik antara pemerintah, Tim Manajemen Sekolah dan

masyarakat.

b. Mutu pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

c. Kesesuaian antara penggunaan dana BOS dengan pembukuan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor penghambat.

a. Minimnya dana BOS yang diberikan pemerintah kepala sekolah.

b. Pencairan dana BOS tidak tepat waktu.

c. Minimnya sumber daya manusia.

1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan, maka

Penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

Sekolah

Memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada seluruh guru, komite sekolah, dan wali murid tentang RKAS yang harus terealisasi dan evaluasi anggaran kegiatan melalui rapat.

Bagi pemerintah

Pemerintah dalam pencairan dana BOS harus tepat waktu. Sebaliknya pemerintah melakukan monitoring terhadap pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS sehingga dana BOS tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aditya Wardiana, Natasha, Saalbi Dwi Prasiti, *Pemahaman konsep prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cab kesamben blitar.*

Afrilliana Fitri, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah*

Ahmad, Jamaluddin, 2015 *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan*

*Aplikasi, Yogyakarta: Gava Media.*

Andng, 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Yogyakarta,*

*Ar-Ruzz Media.*

Andrianto, Nico. 2017. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas

Publik Melalui e-Government, Malang:Bayumedia Publising.

Arikunto, Suharsimi, 1998 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:*

*Rineka Cipta.*

Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Departemen Agama RI Buku Paduan Program BOS dalam Rangka Wajib

Belajar 9 Tahun, Jakarta 2012.

Depatermen Agama RI Buku Paduan Program BOS dalam Rangka WajibBelajar 9 Tahun 2012, hal 11.

Diah parwita Desi, 2008” *Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan*

*Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP.*

Emulyasa, 2009. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Fattah, Nanang, 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan

Sekolah Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

<http://kbbi.web.id/Akuntansi> Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 10.10 WIB.

<http://kbbi.web.id/prinsip> Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 10.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/Transparansi> Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul

10.00 WIB.

Huriyah, Lilik, 2014. Manajemen Keuangan : Sumber-sumber Keuangan

Lembaga Pendidikan Islam Surabaya: UINSA Press

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kompri, 2014. Manajemen Sekolah Teori dan Praktek, Bandung Alfabetta.

Ma’mur Asmani, Jamal 2012 Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, Yogayakarta:

Diva Press.

Minarti, Sri,. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola lembaga Pendidikan Secara

Mandiri, Yogayakarta: Ar-Ruzz Media.

Nasir, Muhammad Ridwan. Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil

Pembukuan Undang-undang Dasar 1945.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah tahun 2015 hal,2

Petunjuk Teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan

Operasional Sekolah, hal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan

Operasional Sekolah 2018, hal 2

Petujuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan

Operasional Sekolah, 2018. Hal.1

Rahaju Tijik. Evaluasi Progam Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

(BOPDA)

Ramly, Nadjamuddin. 2015. Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan

Mencerahkan Jakarta selatan : Grafindo Khazanah Ilmu.

Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003

Sugiyono, 2009. Metodologi Penelitian “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D

Bandung, Alfabeta.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya

Waluyo, 2017. Manajemen Publik, Bandung: Mandar Maju

Widi Lestari Ningtyas, Ony. Dkk, Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.